

# DEMOKRASI DAN KAPITALISME GLOBAL PASCA-PERANG DINGIN

Oleh: Budiawan

Program Pascasarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

## Abstrak

*Democracy do not just measured can take place it general election by prosedural in a state, but core of democracy that is confessing of mirror democracy have to in it. More than that journey and prospect democracy in Indonesia, goodness of level of national and also local there is tendency determined by those who own the capital. Indicator that democracy determined by visible capital owner at legislative institute good process recruitment and also executive. Correct expression to depict the situation "power of capital of bow of power moral". From other side the problem recruitment opening opportunity to be influenced by capital owner also at public policy determination*

*Grow on the problem causing political life domain determined by those who own the capital or incidence of process of subduing of moral power by capital power is because of global capitalism victory after ending of cold war, what is won by capitalism ideology- neoliberalisme. Indonesia state as part of existing state in child take care of the international capitalism strength over a barrel to secede from the grasp from international capital strength clutch. Have the power the capital have ended almost entire all political life domain. For overcome this problem, is hence needed by the make-up of society ability for the self-organization and fight for the importance and also its requirement. This society ability represents the last fortress to weaken the danger neo-liberalism.*

**Kata kunci :** *demokrasi, kuasa moral, ideologi kapitalisme*

## Pendahuluan

Salah satu gejala menarik sejak Perang Dingin usai adalah bertumbuhannya rezim-rezim otoriter di negara-negara sedang berkembang. Akan tetapi, berakhirnya otoriterisme tidak dengan sendirinya membuka jalan menuju demokrasi. Memang di negara-negara tersebut telah diselenggarakan pemilihan umum yang relatif bebas, terbuka dan jujur. Namun demokrasi jelas bukan sekedar penyelenggaraan pemilu. Demokrasi lebih dari sekedar persoalan teknis prosedural pemilihan para wakil rakyat (legislatif) dan penyelenggara pemerintahan (eksekutif dan yudikatif). Demokrasi, per definisi adalah pemerintah dari mereka

yang diperintah. Jika demikian menyerahkan kepercayaan begitu saja kepada para pelaku dalam sistem politik hasil pemilihan umum tidak akan memenuhi definisi itu. Mereka yang diperintah harus mendapatkan akses pengaruh ke dalam sistem politik, jika demokrasi ingin maksimal harus ada partisipasi politik warga negara dalam arti seluas-luasnya (Hardiman, 2004).

### Penundukkan Kuasa Modal atas Kuasa Negara

Dalam kenyataannya partisipasi politik dalam arti lebih dari sekedar menggunakan hak memberikan suara dalam pemilu seringkali tidak efektif atau gagal mempengaruhi kebijakan publik. Yang menarik, ini bukan karena negara terlalu kuat untuk dipengaruhi tetapi justru karena negara sendiri sedang mengalami proses pelemahan. Melemahnya kuasa negara ini tidak lepas dari semakin kuatnya kuasa modal finansial global. Paham neoliberalisme yang diusung kapitalisme global mutakhir memang pada mulanya melucuti kuasa negara sehingga otoriterisme berakhir. Tetapi, pelucutan kuasa negara ini bukan dalam rangka menciptakan perimbangan kekuatan antara negara dengan masyarakat melainkan lebih untuk membuka jalan lapang bagi semakin dominannya kuasa modal. Jika demikian halnya, masih relevankah kita berbicara tentang demokrasi ketika kedaulatan rakyat yang pernah dimanipulasi negara itu kini terancam direbut (sepenuhnya) oleh kuasa modal?

Pertanyaan itu muncul karena demokrasi dalam pengertiannya yang klasik, hanya membahas masalah perimbangan kekuatan antara rakyat dan negara. Semesta kehidupan seakan-akan hanya terdiri dari domain sosial (masyarakat) dan politik (negara). Domain ekonomi (pasar) bukannya dianggap tidak ada, tetapi diasumsikan sebagai bagian terpadu dari domain politik, atau sepenuhnya berada dalam kendali negara. Padahal, realitas dunia mutakhir menunjukkan bahwa domain ekonomi bukan hanya semakin melepaskan diri dari domain politik tetapi bahkan cenderung hendak mendiktenya. Dalam konteks inilah dibutuhkan suatu dataran berpikir baru untuk membaca dan sekaligus mencoba menawarkan solusi secara lebih memadai.

Sebagaimana sudah merupakan pengetahuan umum gagasan demokrasi modern tidak lepas dari ide *trias politica*, yang bertolak dari asumsi bahwa tirani negara bisa dicegah bila ada pemisahan dan sekaligus saling kontrol antara tiga lembaga kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif). Pemahaman semacam ini sudah berumur lebih dari dua abad. Yang dewasa ini sedang menjadi subyek kajian tertentu para pemikir ekonomi-politik dunia dan kepedulian para aktivis sosial di berbagai belahan dunia adalah bagaimana mencegah tirani pasar atau kediktatoran modal. Ide *trias politica* dan demokrasi dalam pengertian yang klasik jelas kurang memadai untuk membaca dan mengatasi masalah ini.

Memang sekitar satu setengah abad yang lalu Karl Marx telah mengantisipasi dan sekaligus menawarkan solusi atas kemungkinan terjadinya tirani modal. Solusi

yang ia tawarkan adalah kolektivitas kepemilikan modal melalui revolusi proletariat. Tetapi, karena revolusi itu hanya bisa berjalan melalui kepemimpinan *vanguard party* maka hasilnya ternyata adalah tirani negara atau lebih tepat tirani partai karena negara kemudian menjelma ke dalam partai tunggal yakni partai komunis. Di situ negara atau partai mencengkram domain ekonomi dan domain sosial sekaligus, berikut segala konsekuensi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara. Dengan demikian Marxisme, dalam penegrtian yang klasik bukan hanya menimbulkan masalah baru yang tidak kalah seriusnya tetapi juga menelan apa yang oleh sosiolog Peter L. Berger (1974) disebut 'biaya-biaya manusiawi' (*human costs*) yang luar biasa besarnya. Meskipun demikian, kegagalan gagasan Marxis klasik itu memberikan pelajaran penting, yakni bahwa tirani modal seperti halnya tirani yang lain, hanya bisa dicegah bila ada perimbangan kekuatan antara ketiga poros pemegang ketiga domain kehidupan sebagaimana disinggung di atas.

Perimbangan ketiga poros kekuatan itu mutlak perlu. Sebagaimana diingatkan oleh B. Henry-Priyono (2002), dominasi satu/dua poros atas satu/dua poros lainnya menjadi jalan menuju malapetaka. Dominasi badan publik (baca: negara) atas hidup komunitas dan kinerja pasar menghasilkan Stalinisme, sebagaimana terjadi di Uni Soviet dan hampir semua negara komunis lainnya pada era Perang Dingin. Seperti disinggung di atas, di bawah dominasi negara atas domain sosial dan ekonomi, negara (atau partai) nyaris menjadi penentu denyut nadi kehidupan setiap warga negara.

Sedang dominasi komunalisme atas otoritas legitim badan publik dan kinerja pasar melahirkan tribalisme agamis-etnik-rasial, sebagaimana yang hingga kini masih terjadi di beberapa bagian benua Afrika. Denyut nadi kehidupan setiap orang sangat tergantung pada kekuatan pemimpin puak, Di situ konsep warga negara nyaris tidak ada maknanya karena negara sendiri telah menjadi sesuatu yang virtual. Dalam istilah antropolog Filip de Boeck (1998 :31), negara sudah mirip pesawat telpon di sejumlah negara di Afrika, yakni 'ada tetapi tidak berfungsi'. Dalam batas tertentu, saya kira kondisi serupa juga terjadi di beberapa daerah di Tanah Air ketika konflik-konflik 'horisontal' sedang berlangsung di mana tangan-tangan kuasa negara nyaris tidak berdaya mengelolanya jika bukan malah mengambil keuntungan darinya.

Terakhir dominasi pasar atas badan publik dan komunitas memperanakan brutalitas neoliberal, Di bawah nooliberalisme, denyut nadi kehidupan setiap orang sangat tergantung pada seberapa jauh ia memiliki akses pada modal. Ketiadaan akses pada modal berarti ketidakberdayaan, dan negara yang mestinya berperan sebagai penjamin kesejahteraan publik kini tak sanggup menyantuni kelompok-kelompok masyarakat yang tak berdaya. Dengan kata lain, di bawah tatanan neoliberal kelompok-kelompok tak berdaya (*the powerless*) ditinggalkan sendirian. Nasib hidup (sebagian dari) mereka barangkali sangat tergantung pada uluran tangan badan-badan penyalur remah-remah keuntungan penguasa modal,

atau mengkais-kais sisa-sisa dari remah-remah itu. Bagi mereka seakan-akan keberlangsungan hidup yang layak bukan lagi sebuah hak, tetapi sekedar hasil kemurahan hati penguasa modal. Jika hal ini terjadi dan dibiarkan terus terjadi, maka modal akan menghegemoni semesta kehidupan.

Meskipun demikian, tesis bahwa di bawah hegemoni modal negara menjadi tak berdaya adalah tidak sepenuhnya benar. Tesis ini banyak benarnya pada konteks negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi hampir-hampir tidak benar pada konteks negara-negara industri maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Bersama globalisasi, pemerintah negara-negara industri maju semakin canggih dalam mengembangkan kecakapan teknis untuk meregulasi modal. Modal dapat bergerak leluasa ke tempat-tempat bebas pajak (*tax havens*) dan pusat-pusat perbankan di luar negeri hanya jika negara-negara inti seperti AS dan Inggris mengizinkannya. Di lain pihak, pemerintah negara-negara industri maju itulah yang mendorong pemerintah di negara-negara sedang berkembang melakukan berbagai kebijakan deregulasi, yang kemudian salah satu wujud kongkretnya adalah privatisasi badan-badan usaha milik negara serta pengurangan atau bahkan pencabutan subsidi atas barang-barang dan jasa-jasa layanan publik. Ini merupakan pilihan politik bukan kebutuhan teknis. Dengan kata lain, isu pokok dalam dunia mutakhir adalah kapitalisme (yang beroperasi secara global), sedangkan globalisasi (dengan segala pernik-perniknya) hanyalah sebuah isu (Tabb, 1997 : 28).

Dari ketiga bentuk malapetaka itu, tirani negara berangkali nyaris sudah menjadi cerita masa lalu; sedangkan tribalisme, di berbagai belahan dunia masih dan sedang menjadi cerita manusia masa kini. Sementara tirani modal mulai mengintai di berbagai belahan dunia, khususnya negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, dan segera mulai monjadi cerita masa depan. Dari dan pada persoalan inilah isu demokrasi bendaknva dikontekstualisasikan. Dengan demikian rumusan pertanyaannya kira-kira adalah bagaimana demokrasi hendaknya dipahami (dan dipraktikkan) ketika ancaman terhadap kesejahteraan publik bukan pertama-tama dan terutama berasal dari negara, tetapi dari poros kekuatan modal? Dengan pertanyaan ini tujuan utamanya bukanlah melenyapkan kekuatan modal, tetapi menyeimbangkan tiga poros kekuatan sebagaimana disebut di atas.

### **Urgensi Ruang Publik Politis dan *Civil Society***

Di atas telah disebut-sebut perlunya partisipasi politis warga negara dalam arti seluas-luasnya. Syarat mudah bagi munculnya partisipasi yang seluas-luasnya itu adalah adanya dan terpeliharanya ruang publik politis. Pengertian inti dari konsep ini adalah suatu ruang atau panggung tempat warga negara dapat menyatakan opini, kepentingan serta kebutuban mereka secara diskursif dan bebas tekanan (Hardiman, 2004). Dalam konteks mendorong dan rnelelihara keseimbangan tiga poros kekuatan di atas, ruang publik politis bisa menjadi arena di rmana tiranisasi

modal bisa diredam atau dinetralisasikan antara lain melalui tuntutan akan *civic accountability* modal (Herry-Priyono, 2002). Seperti halnya negara modalpun sebenarnya membutuhkan legitimasi sebab dengan legitimasi. Sebab dengan legitimasi operasionalisasi modal bisa lebih aman dan berkelanjutan. Ini merupakan celah yang bisa dimanfaatkan kekuatan poros masyarakat (dan juga negara) untuk menuntut kinerja modal bisa dipertanggung jawabkan secara publik. Artinya, modal harus bisa menunjukkan tentang output yang dihasilkan dan ongkos-ongkos yang diciptakan (misalnya, pencemaran lingkungan, eksploitasi tenaga kerja) serta seberapa jauh ia menanggung ongkos-ongkos itu. Ini berarti kekuatan masyarakat hadir dan mendesak kehadirannya untuk diperhitungkan sebagai salah satu *stake holders* dalam aktivitas modal.

Dalam konteks Indonesia mutakhir, ketika negara perlahan-lahan semakin tunduk pada kuasa modal finansial global sebagaimana dampak pada gejala privatisasi mulai dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga merambah sektor-sektor pelayanan publik peluang untuk menetralisasi ancaman tiranisasi modal tinggal bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri. Kemampuan masyarakat untuk mengorganisasikan diri dan memperjuangkan kepentingan serta kebutuhannya merupakan benteng terakhir untuk meredam bahaya neoliberalisme. Dalam konteks inilah demokrasi tetap menemukan relevansinya. Tetapi di sini demokrasi lebih dimengerti sebagai ruang publik (*a public sphere*), yang diisi oleh asosiasi-asosiasi sukarela yang berada di luar domain politik dan ekonomi atau yang populer disebut *civil society* (masyarakat warga). Karena *civil society* membutuhkan ruang publik, sedangkan ruang publik adalah ruangnya *civil society* maka kedua konsep yang merupakan bagian penting dari wacana demokrasi ini menjadi hampir sinonim (Perez-Diaz, 1995 :99).

Persoalannya adalah apa makna. ruang publik jika kekuatan-kekuatan *civil society* sendiri sudah terkooptasi (atau bahkan minta dikooptasi oleh) kekuatan modal? Dalam pertanyaan ilustratif, apa makna kebebasan menyampaikan pendapat dan kepentingan, jika misalnya, masyarakat adat yang sebenarnya lingkungannya terancam oleh kegiatan industri pengolahan hasil hutan, malah mendukung kegiatan itu asal mendapat sebagian hasilnya, alih-alih menentang atau minimal membatasi kegiatan industri tersebut?

Jika uang bicara tidak pada tempatnya, demokrasi memang menjadi tak ada maknanya, entah di bawah tirani negara atau tirani modal. Sebab, 'dunia uang', kata David C. Korten, memiliki imperatifnya sendiri, yakni 'pertumbuhan dan ekspansi ekonomi tanpa batas' (Korten, 1998:8). Dalam dataran sosiologis, persoalan masyarakat dunia mutakhir barangkali adalah bagaimana menempatkan 'dunia uang' sebagai abdi, alih-alih tuan, 'dunia kehidupan'. Baru dari situ kita berbicara (kembali) tentang demokrasi.

### Daftar Pustaka

- Berger, Peter L. (1974) *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change*, New York : Basic Books.
- Hardiman, F Budi (2004) "Ruang Publik Politis : Komunikasi Politis dalam Masyarakat Majemuk", *Kompas*, 4 Agustus.
- Herry-Priyono, B. (2002) "Sesudah Modal Lolos dari *Trias Economics*", *Kompas*, 9 Desember.
- Korten, David C. ( 1998) *Globalizing Civil Society Reclaiming Our Right to Power*. New York: Seven Stories Press
- Perez-Diaz, Victor ( 1995) "The Possibility of Civil Society : Traditions, Character and Challenges", dalam John A. Hall (ed.) *Civil-Society: Theory, History Comparison*, London : Polity Press.
- Tabb, William K, (1997) "Globalization it *An Issue*, the Power of Capital is *The Issue*", *Monthly Review*, Vol. 49, No. 2.